

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap negara pastilah memiliki berbagai problematika atau permasalahan baik internal maupun eksternal negara tersebut. Baik negara yang tergolong kedalam negara maju ataupun negara berkembang. Indonesia ialah sebuah negara yang tergolong sebagai negara berkembang. Tentulah Indonesia yang berpredikat negara berkembang ini memiliki berbagai macam masalah yang sangat banyak, terutama dalam hal kemiskinan. Hal ini dapat dilihat melalui data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), di akhir September 2021 jumlah kemiskinan di Indonesia mencapai angka 26,50 juta jiwa penduduk yang tergolong kedalam kategori miskin.¹

Penanganan terhadap kemiskinan harus ditanggulangi dengan sungguh-sungguh baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dalam upaya pengentasan tingkat kemiskinan yang diupayakan oleh pihak pemerintah berupa kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan terhadap individu, keluarga, masyarakat yang memiliki atau yang belum memiliki pekerjaan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan yang mencukupi bagi keluarganya. Selain itu kemiskinan yang terjadi dapat berakibat buruk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dilihat dari pandangan Ekonomi, seseorang dapat disebut sejahtera, apabila mempunyai pemasukan dan kekayaan yang berlebih. Selain itu, kata sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan sebagai suatu keadaan yang aman, makmur, dan

¹ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022), 3

sentosa. Aman yaitu terhindar dari marabahaya dan juga ancaman. Hidup aman berarti sebuah kondisi dimana seorang individu dalam masyarakat terhindar dari rasa takut dan khawatir. Sentosa memiliki makna suatu kondisi yang terhindar dari semula kesulitan dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa berarti seseorang atau individu memiliki kehidupan yang aman, damai, dan tidak atau terhindar dari kekacauan atau keributan.

Sementara itu, makmur memiliki artian sebagai suatu keadaan yang memiliki apapun yang berkecukupan, dan tidak memiliki suatu kekurangan apapun. Hal ini berarti, semua keperluan dalam kehidupannya tercukupi. Berlandaskan dari tiga kata yang tertera didalam pengertian sejahtera tersebut, maka hidup dikatakan sejahtera apabila setidaknya mampu memenuhi tiga kategori yakni: (a) terhindar dari rasa takut dan khawatir (yang berarti memiliki kehidupan aman), (b) terhindar dari kesulitan (yang berarti hidup dengan sentosa), (c) serba berkecukupan (yang berarti kehidupan yang makmur).² Oleh sebab itu, banyak cara digunakan oleh pemerintah guna menekan angka kemiskinan yang ada sehingga dapat menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu ikhtiar yang diperbuat oleh pemerintah ialah dengan menyalurkan subsidi bantuan berupa program subsidi raskin (pemberian subsidi beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah).

Seperti yang telah diketahui bahwa manusia pada hakikatnya perlu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau konsumsi. Semenjak krisis bahan pangan pada tahun 1998, pemerintah sepakat mencurahkan atensi yang besar terhadap pemenuhan pangan masyarakat melalui program OPK (Operasi Pasar Khusus). Berbeda dengan kontribusi subsidi pangan yang sebelumnya, OPK menyalurkan subsidi beras secara target kepada orang yang membutuhkan seperti rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK

² Ismail Munawar, Budi Santosa Dwi, Erani Yustika Ahmad, *Sistem Ekonomi Indonesia Tasrifan Pancasila & UUD 1945* (Jakarta: Erlangga, 2015), 56.

beralih nama menjadi program raskin yang bermaksud untuk lebih memperjelas sasaran penerima manfaat. Program ini sangat baik dan tergolong kedalam suatu rancangan nasional yang bersifat horizontal dan vertikal. Semua kementerian atau lembaga (K/L) yang bersangkutan baik dipusat ataupun didaerah memiliki andil bagian tugas dan bertanggung jawab dalam menjalankan program sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing.³

Provinsi Jawa Timur ialah satu dari 34 provinsi yang melaksanakan program bantuan pemerintah. Hal ini terjadi karena tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur mencapai 4.572,73 ribu jiwa atau setara dengan 11,40 persen. Salah satu daerah di provinsi jawa timur yang menerapkan program BSP adalah Kabupaten Blitar.

Tabel 1. 1
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blitar Berdasarkan
Tingkat Konsumsi makanan per-Kapita

NO	Tahun	Konsumsi per-Bulan
1	2018	Rp. 223.352,00
2	2019	Rp. 250.853,00
3	2020	Rp. 250.630,00
4	2021	Rp. 267.524,00
Rata-rata		Rp 248.090,00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 konsumsi masyarakat kabupaten Blitar sebanyak Rp. 223.352,00, pada tahun 2019 konsumsi masyarakat kabupaten Blitar sebanyak Rp. 250.853,00, pada tahun 2020 konsumsi masyarakat

³ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Pedoman Umum Raskin Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin* (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2011), 1.

kabupaten Blitar sebanyak Rp. 250.630,00, sedangkan pada tahun 2021 konsumsi masyarakat kabupaten Blitar sebanyak Rp. 267.524,00. Berdasarkan data konsumsi perkapita, selama kurun waktu 4 tahun dari 2018-2021, diperoleh rata-rata pengeluaran pertahun sebesar Rp 248.090,00. Rata – rata tersebut, masih tergolong kecil jika dibandingkan kota-kota lain di Jawa Timur, dimana pengeluaran konsumsi yang dikeluarkan per-kapita sebesar Rp. 557.000,00. Hal ini terjadi dikarenakan banyak penduduk miskin di Kabupaten Blitar sebesar 112,62 ribu jiwa penduduk dari total keseluruhan sebanyak 1.223.745 jiwa.

Tabel 1. 2

Data penerima BPNT Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

No	Nama Desa	Penerima			
		BPNT			BSP
		2018	2019	2020	2021
1	Bendosari	233	279	277	238
2	Darungan	345	345	343	280
3	Dawuhan	901	1.321	1.173	937
4	Jimbe	185	219	221	180
5	Kademangan	231	310	350	297
6	Kebonsari	243	345	343	251
7	Maron	358	384	396	289
8	Pakisaji	255	284	249	206
9	Panggungduwet	201	273	249	185
10	Plosorejo	256	244	291	241
11	Plumpungrejo	284	304	389	283
12	Rejowinangun	110	110	134	121
13	Sumberjati	234	217	260	210
14	Sumberjo	332	422	372	285
15	Suruhwadang	341	389	358	289
Total		4.509	5.446	5.405	4.292

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar

Salah satu daerah yang ada Kabupaten Blitar yang melaksanakan program BSP adalah Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 1.1 dimana Desa Dawuhan Menempati urutan pertama desa yang memiliki masyarakat penerima program BSP terbanyak. Hal ini tercermin dari jumlah penerima pada tahun 2018 Desa Dawuhan memiliki penerima program BNPT sebanyak 901, pada tahun 2019 sebanyak 1.321, dan pada tahun 2020 sebanyak 1.173 orang. Pada tahun 2021 program BNPT berganti nama menjadi Bantuan Sosial Pangan atau disingkat BSP, pada Desa Dawuhan masih menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah penerima sebanyak 937 orang.

Program subsidi beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah (raskin) di Desa Dawuhan sebanyak 10 kg beras setiap bulannya dengan di bebaskan uang tebusan seharga Rp. 3000 per-kg. Seiring dengan bergulirnya waktu program pemerintah yang awalnya

bernama Program Raskin, pada tanggal 28 Agustus 2015 dirubah menjadi program Rastra atau Program Bantuan Sosial Keluarga Sejahtera, bantuan dari pemerintah tersebut tetap sama yaitu 10 kg beras perbulan dan tidak dibebankan biaya untuk mengambilnya (gratis). Pada tanggal 25 November 2018 pemerintah merubah program Rastra menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).dengan jumlah uang sebanyak Rp.110.000 perjanuari 2019 dan berubah lagi perjanuari 2020 sampei february 2020 menjadi RP.150.000 dan berubah lagi permaret 2021 sampei sekarang menjadi RP.200.000 Dan pada tahun 2021 pemerintah merubah program tersebut menjadi Bantuan Sosial Pangan (BSP). bantuan dari pemerintah tersebut sebanyak Rp200.000 perbulan.⁴ Selain itu, program sembako memperbanyak jenis komoditas yang dapat di beli sehingga tidak hanya sekedar beras dan telur, seperti pada program BPNT seblumnya. Hal ini sebagai usaha dari pihak pemerintah dalam upaya pencegahan stunting.⁵

Hal ini diupayakan oleh pihak pemerintah sehingga dapat menstimulasi usaha eceran rakyat dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak hanya memperoleh pemenuhan gizi berupa karbohidrat saja akan tetapi juga mendapatkan protein seperti telur. Pada program sebelumnya Raskin dan Rastra masyarakat yang tergolong kedalam RTS-PM ditemani oleh TKSK (Tenaga Kerja Sukarela) sedangkan pada program BNPT dan BSP masyarakat yang tergolong kedalam penerima manfaat didampingi oleh pendamping program PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) ini berupa uang yang dikeluarkan setiap 1 bulan sekali. Dan total pada setiap Kartu Keluarga (KK) tidak serupa jumlah nominal uang yang diperoleh.

⁴ Mahbuby ,wawancara dengan penulis, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, 18 sebtember 2021, Pukul 12.13 WIB.

⁵ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, “*Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I tahun 2020*” (Jakarta: Kantor Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2020), 4.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan ditemukan permasalahan dalam penyaluran program BSP. Masalah yang kerap terjadi dalam penyaluran bantuan BSP ialah bantuan yang disalurkan dirasa oleh warga kurang tepat sasaran serta perubahan nama dari BPNT pada tahun 2020 menjadi BSP pada tahun 2021 dimana keluarga penerima manfaat (KPM) diberi sebuah kartu ATM dari Tenaga Kerja Sukarela sebagai sarana untuk mempermudah pengambilan bantuan.

Akan tetapi yang kerap terjadi ialah adanya perbedaan data pada Kartu Keluarga dan ATM tersebut, misalnya pada Kartu keluarga terdapat tanda petik pada nama KPM sedangkan pada ATM tidak terdapat tanda petik pada nama KPM sehingga bantuan tidak dapat masuk atau tidak dapat diterima oleh KPM. Setelah dilakukannya penyelidikan dan perbaikan data, bantuan barulah dapat masukan atau diterima oleh KPM. Selain itu berdasarkan wawancara dan observasi awal yang dilakukan kepada penerima program BSP dan yang bukan penerima program BSP, mereka menyatakan bahwa program yang berjalan pada saat ini kurang tepat sasaran, dimana orang yang memiliki kendaraan mewah seperti mobil ditemukan masih menerima program bantuan tersebut, sedangkan adapula orang yang sudah janda dan tua renta tidak mendapatkan program BSP tersebut.

Pada Penelitian ini peneliti berminat meneliti tentang program Bantuan sosial pangan (BSP) dikarenakan berdasarkan survey awal yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan praktek yang menyalahi pedoman (pedoman umum) dan bantuan yang berhenti data tidak sama dengan data dupcapil. Dari latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Program Bsp (Bantuan Sosial Pangan) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Prespektif**

Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Penerima BSP Warga Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program BSP pada Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana program BSP dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga prespektif ekonomi islam pada Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang program BSP pada Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar
2. Mengetahui tentang program BSP dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga prespektif ekonomi islam pada Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penulis diharapkan mampu memperluas wawasan, ilmu serta pengetahuan mengenai efektivitas program BSP (Bantuan Sosial Pangan) terhadap kesejahteraan

keluarga (studi kasus pada penerima bsp warga Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar)

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, serta kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi yang telah didapatkan serta menambah koleksi kepustakaan IAIN Kediri.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi saah satu sumber kajian dalam melihat seberapa jauh efektivitas BSP terhadap kesejahteraan keluarga penerima bantuan.

E. Telaah Pustaka

Berikut merupakan telaah pustaka yang digunakan didalam penelitian ini:

1. *Implementasi Kebijakan Penyalurah Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir*, oleh Maghfiroh (2020), mahasiswi Universitas Sriwijaya.

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Penyalurah Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Hasil dari penelitian ini diketahui Implementasi Kebijakan Penyalurah Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir belum dapat dinyatakahn berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari bebrapa masalah yang ada, diantaranya adalah larangan *e-warong* dan KPM, belum adanya penyuluhan kepada KPM, serta proses transaksi pembelian bahan pangan di *e-warong* yang kerap kali terkendala karena rusaknya mesin EDC.⁶

⁶ Maghfiroh, “Implementasi Kebijakan Penyalurah Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir” (*Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020), vii.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang memiliki judul Implementasi Kebijakan Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir adalah sama-sama meneliti mengenai program bantuan pemerintah yang berbasis non tunai. Perbedaan yang terdapat diantara penelitian ini dengan penelitian te yaitu penelitian ini meneliti mengenai kesejahteraan masyarakat yang mendapatkan program BSP sedangkan penelitian terdahulu mencari tahu apakah implementasi yang ada pada program BPNT sudah sesuai ataukah belum.

2. *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal*, oleh Kuswatun Khasanah (2020), Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo.

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya program BNPT di Kelurahan Ketapang yang dipraktikkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan transaksi non-tunai melalui e-waroeng pada program BNPT serta mampu meringankan beban hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian. Selain itu, program ini juga dapat memberikan stimulus terhadap peningkatan daya beli masyarakat, serta dapat melibatkan masyarakat untuk menjadi wirausaha.⁷

⁷ Kuswatun Khasanah, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020), xii.

Adapun persamaan dari penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai bantuan dari pemerintah. Sedangkan perbedaan yang ada adalah pada penelitian tersebut meneliti mengenai apakah terdapat peningkatan ekonomi keluarga miskin, sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan ini membahas mengenai bagaimana kesejahteraan masyarakat dengan adanya program bantuan tersebut.

3. *Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Mengurangi Tingkat Pengeluaran Pangan Rumah Tangga di Kelurahan 3-4 Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang*, oleh Dian Amalina (2018), Mahaiswi Universitas Sriwijaya

Penelitian ini berfokus pada Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Mengurangi Tingkat Pengeluaran Pangan Rumah Tangga di Kelurahan 3-4 Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan 3-4 Ulu Kota Palembang beroperasi kurang efektif dengan nilai rata-rata skor sebesar 12,58. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pengeluaran rumah tangga yang justru berkurang sebesar 8,12% setelah program BNPT ada. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa, tidak ada hubungan yang positif antara efektivitas program BNPT dengan tingkat pengeluaran per-kapita penerima manfaat.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelirian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan obyek penelitian mengenai kebijakan publik Bantuan dari pemerintah. Sedangkan ketidaksamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian hendak dilakukan adalah obyek yang diteliti mengenai bagaimana program dapat mengurangi

⁸ Dian Amalia, "Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Mengurangi Tingkat Pengeluaran Pangan Rumah Tangga di Kelurahan 3-4 Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang" (*Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018).

tingkat pengeluaran pangan sedangkan yang hendak diteliti mengenai kesejahteraan penerima program bantuan.

4. *Peranan Industri Rumah Tangga Produksi Krecek Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Muslim di Dsn. Becek Ds. Kalirong Kec. Tarokan Kab. Kediri*, oleh Nur Ifa Mamlu'ah (2013), STAIN Kediri.

Pada penelitian ini berfokus pada Peranan Industri Rumah Tangga Produksi Krecek Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Muslim di Dsn. Becek Ds. Kalirong Kec. Tarokan Kab. Kediri. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga temuan yaitu: (1) Terdapat sebanyak 73 industri krecek di Dsn. Becek Ds. Kalirong Kec. Tarokan Kab. Kediri. (2) Tingkat kesejahteraan dari masyarakat nampak terpenuhi dengan baik. (3) keberadaan industri krecek sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.⁹

Adapun persamaan penelitian ialah sama-sama melakukan penelitian dengan obyek penelitian kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terdapat pada obyek kajian yang diperiuntukkan pada penelitian ini adalah mengenai industri rumahtangga, sedangkan yang hendak dilakukan mengenai BSP.

5. *Peranan Produlsi Jajanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Paguyuban "Sari Roso" Dusun Ploso Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)*, oleh Elok Ekvina Biharida (2019), Mahasiswi IAIN Kediri.

Penelitian ini berfokus pada Peranan Produlsi Jajanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Paguyuban "Sari Roso" Dusun Ploso Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar). Hasil dari kajian ini yaitu Progam

⁹ Nur Ifa, "Peranan Industri Rumah Tangga Produksi Krecek Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Muslim di Dusun. Becek Desa. Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri" (*Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Kediri, 2013), viii.

paguyuban “Sari Roso” mempunyai prospek kedepan yang baik, hal ini dapat diketui berdasarkan proses kegiatan yang dapat dinilai sangat baik serta dalam pengelolaan sistem paguyuban dapat sejalur dengan tujuan yang dirancang. Peran paguyuban sari roso yaitu dapat mempererat jalinan, komunikasi, serta solidaritas yang telah mampu dikatakan sangat baik. Adapun bentuk ekskalasi kesejahteraan di desa Ploso ditandai dengan jumlah pemasukan pendapatan yang bertambah, konsumsi perkapita bertambah, keadaan tempat tinggal layak untuk dihuni, peningkatan kesehatan tiap anggota dalam keluarga, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan di kawasan Dusun Ploso, tingkat pendidikan yang semakin baik dan kemudahan dalam mendapatkan fasilitas transportasi untuk menjamah dunia luar.¹⁰

Adapun persamaan dan perbedaan yang ada adalah pada penelitian ini dan penelitian yang hendak dilakukan sama-sama meneliti mengenai kesejahteraan, sedangkan perbedaannya dalah obyek penelitian terdahulu adalah mengenai produksi jajanan, sedangkan pada penelitian yang hendak dilakukan mengenai Kebijakan Publik BSP.

¹⁰ Elok Ekvina Biharida, “Peranan Produksi Jajanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Paguyuban “Sari Roso” Dusun Ploso Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)” (*Skripsi*, Institute Agama Islam Negeri Kediri, Kediri, 2019), vii.